

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Teguh Prastyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Evi Hartanti, S.H. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005.

M. Ali Zidan. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

Muladi, Arief Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2010.

R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2011.

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2010.

Roni Andespa. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Riau Pekanbaru: Alaf, 2001.

Rosady Ruslan. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1999.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, 2007.

3. Jurnal

As'ad Al Burhan. "Reformulasi Kebijakan Pidana Mati terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 130–148.

B. Sipayung, S. O. Manullang, & H. K. Siburian. "Penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 134–142.

Baharudin Ahmadi. "Penerapan pidana mati warga negara asing: Antara kepastian hukum, kepentingan diplomatik dan hak asasi manusia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 312–324.

Cipta Ismara, Y., & Margaretha, L. P. "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (2024): 133–148.

Dhandy Parindo et al. "Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 129–142.

Dita Melati Putri. "Hukuman pidana mati dalam KUHP baru dan perspektif abolisionalis serta retensionis." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 1–13.

Ewapriyandi Fahmi Saputra & Hery Firmansyah. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan

Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4493–4504.

Fahrian Fadilah. "Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 11 (2022): 814–824.

H. Katimin, S. Somarwidjaya, & D. K. Sugiharti. "Faktor-Faktor Sulitnya Penerapan Hukuman Mati pada Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara Dalam Studi Kasus Keadaan Tertentu." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no.2 (2021): 142–173.

K. Saraswaty. "Teori Turut Serta Melakukan (Medeplegen) Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (2024): 2469–2485.

Henry Ananto Cahyono. "Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Bank." *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 1 (2022): 122–140.

Daud Munasto. "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022): 24–38.

Aqmarina Khusnul Baiti. "Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif." *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 114–129.

Lukman Hakim Sangapan et al. "Penegakan hukum korupsi di Indonesia: Perspektif systematic literature review (2010–2023)." *IMPERIUM RESEARCH: Law Science and Politics Journal* 1, no. 1 (2025): 9–17.

Mahdi, W. L., Garini, M. R., & Azzahra, C. I. "Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 85–101.

Naftali Ronaldo & Ibrahim Aji Lukman. "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 147–148.

Dwi Helmi Pradika, Sukinta, Irma Cahyaningtyas. "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal*, 2022.

- Pane, M. D. "Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia." *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2012): 37–48.
- Pitra Romadoni Nasution, Nuranisah Nuranisah, & Nurhalimah Nurhalimah. "The Effectiveness of Impoverishment Criminal Punishment Against Corruptor Families: Efektivitas Hukuman Pidana Pemiskinan terhadap Keluarga Koruptor." *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025): 45–63.
- R. Rasmuddin, K. Kamaruddin, & W. Umar. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan." *Jurnal Rechts* 11, no. 2 (2022): 125–140.
- R. Suprihandoko. "Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkara Korupsi Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. JKT. PST." *Kajian Hukum* 7, no. 1 (2022): 38–52.
- Said Munawar. "Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 8, no. 1 (2025): 1–19.
- Sariati, M. A., Adismana, O. H., & Melvyanasari, R. "Analisis Yuridis Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2425–2431.

Soenartho, G. A. "Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Upaya Makar Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1304/2019/PID. B. 2019/PN JKT PST)." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 1820–1844.

Valentine, V. L., Eskinugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. "Penafsiran keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi: Perspektif teori kepastian hukum." *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023): 14–27.

Warah Anjari. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi." Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. *E-Journal Undip*. Diakses 25 Maret 2025.

Zulfitra Ramadana & Yusuf M. Said. "Sulitnya pembuktian kerugian perekonomian negara pada perkara korupsi." *Jurnal Konsep dan Implementasi Hukum* 7, no.4 (2024).

Eko Suprihanto, Yos Johan Utama, & Irma Cahyaningtyas. "Reformulasi pemberantasan korupsi di Indonesia: Perspektif kepolisian menghadapi korupsi sebagai ancaman perang proksi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 204–219.

4. Sumber Daring

Admin. "Hukuman Mati." Wikipedia. Diakses 5 Oktober 2013.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati.

Fergi Nadira. "10 Negara ASEAN dari yang Paling Korup hingga Paling Bersih."

CNBC Indonesia, 14 Maret 2025.

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250314155258-33-618740/>

Kukuh Galang Waluyo. "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya."

DJPb Kemenkeu. Diakses 25 Maret 2025.

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya>.

Waris Anjari. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi." *E*

Journal Undip. Diakses 25 Maret 2025.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327>